

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan semua proses yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Pada intinya pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan perubahan yang terus menerus kearah yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai perubahan aspek sosial seperti ekonomi, politik, infrastruktur, pendidikan, teknologi dan budaya. Oleh sebab itu pembangunan merupakan syarat bagi kelangsungan suatu negara. Komponen dasar atau nilai inti untuk memahami pembangunan yang paling hakiki antara lain kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*) serta kebebasan (*freedom*). Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh masyarakat (Todaro,1998).

Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia UUD 1945, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal itu berarti, menikmati kehidupan yang layak serta hidup bebas dari kemiskinan merupakan hak asasi setiap warga negara dan tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara. Secara khusus, IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup. Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui Human Development Report yang kemudian berlanjut setiap tahun. Unsur – unsur yang terpenting dalam laporan-laporan tersebut, yang mulai terbit sejak tahun 1990 adalah konstruksi dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia. IPM mencoba memeringkatkan semua negara pada skala antara nol (prestasi pembangunan manusia terendah) hingga satu (kinerja pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan tiga kriteria atau hasil akhir pembangunan, yakni ketahanan hidup, pengetahuan, serta kualitas standar hidup (Todaro,1998).

IPM dikembangkan oleh Amartya Sen dalam bukunya *Development as Freedom* (Sen, 1999). Indeks ini lebih mengedepankan hal-hal yang lebih sensitif dan mendetail sehingga dianggap lebih efektif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Empat elemen utama dalam pembangunan manusia yaitu, produktivitas, pemberdayaan, pemerataan dan keberlanjutan (UNDP,2014).

UNDP mengukur kesejahteraan dengan menyusun suatu Indeks komposit berdasarkan empat indikator yaitu,angka harapan hidup pada waktu lahir, angka melek huruf penduduk dewasa, rata-rata lama sekolah, kemampuan daya beli. Alasan pembangunan manusia perlu diperhatikan

karena: pertama, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal dalam mengurangi kemiskinan. Kedua, banyak negara-negara maju yang tingkat pendapatannya tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah sosial seperti: AIDS, gelandangan, kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapat rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia (UNDP,1995).

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, geografi, gender dan lokasi sekitar. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegritas dan bersinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan (Sukmaraga,2011).

Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik untuk semua orang, laki-laki maupun perempuan harus diberdayakan untuk ikut dalam berpartisipasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk menyediakan sebanyak

mungkin kebutuhan dasar masyarakat, atas dasar itulah syarat penentu keberhasilan ekonomi adalah membaiknya kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat (Ginting, 2008).

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai jenis peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah (Guritno, 1993):

1. Peran Stabilisasi, pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga supaya perekonomian berjalan dengan normal. Menjaga supaya permasalahan yang terjadi pada sektor perekonomian tidak menyebar ke sektor lainnya.
2. Peran Distribusi, pemerintah harus membuat kebijakan supaya alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara efisien supaya kekayaan suatu negara dapat terdistribusikan secara baik di masyarakat.
3. Peran Alokasi, pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara itu terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik dan individu. pemerintah harus menentukan seberapa besar barang-barang publik yang diperlukan masyarakat.

Semakin meningkatnya kegiatan manusia dalam menjalankan ketiga peran diatas, maka tentunya diperlukan pengeluaran dana yang besar untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah. Ini merupakan konsekuensi bagi pemerintah sebagai wujud tanggung jawab

atas kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ketiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantaranya yang menjadi prioritas pemerintah mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia.

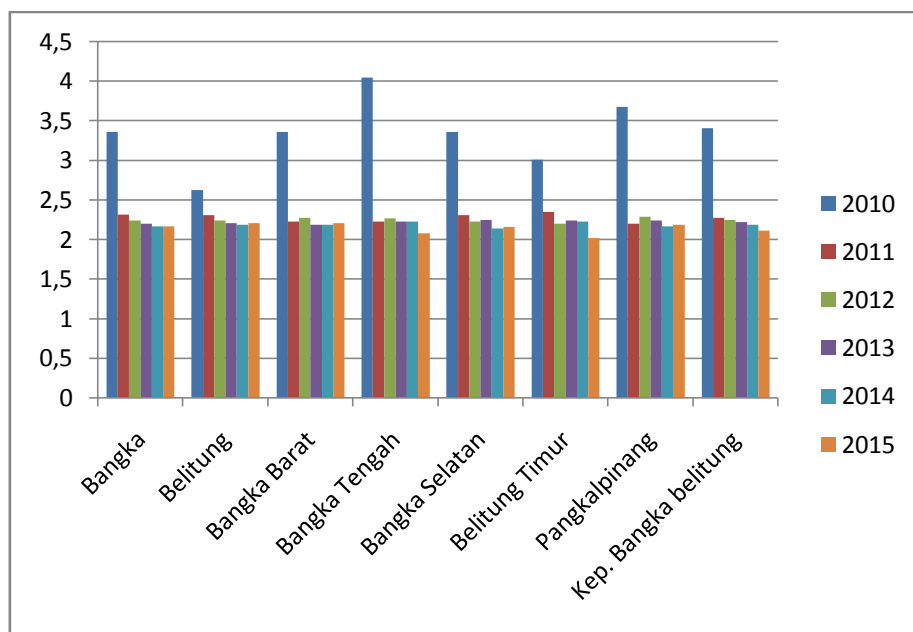
Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera
Tahun 2011-2015

Provinsi	Tahun					nilai rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Aceh	67,45	67,81	68,3	68,81	69,45	68,364
Sumut	67,34	67,74	68,36	68,87	69,51	68,364
Sumbar	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98	68,884
Riau	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	69,826
Jambi	66,14	66,94	67,76	68,24	68,89	67,594
Sumsel	65,12	65,79	66,16	66,75	67,46	66,256
Bengkulu	65,96	66,61	67,5	68,06	68,59	67,344
Lampung	64,2	64,87	65,73	66,42	66,95	65,634
Kepulauan Bangka	66,59	67,21	67,92	68,27	69,05	67,808
Kepulauan Riau	71,61	72,36	73,02	73,4	73,75	72,828

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016

Dari Tabel 1.1 dilihat bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2011-2015 menunjukkan angka yang signifikan yang terus berfluktuasi positif dalam kurun waktu tersebut. Ditahun 2015 IPM sebesar 69,05. Diwilayah Sumatera IPM Bangka Belitung berada diposisi ke enam yaitu berada di atas Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung dengan nilai rata-rata 67,808. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari

Sumatera Selatan, namun menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000. Dengan nilai rata-rata IPM Bangka Belitung yang lebih besar dari Sumatera Selatan itu membuktikan bahwa pembangunan manusia di Bangka Belitung lebih baik dari Sumatera Selatan dan menunjukkan angka yang signifikan yang berfluktuasi positif dalam kurun waktu tersebut. Angka IPM ini merupakan salah satu indikator target pencapaian pembangunan dan sebagai dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepannya.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Gambar 1.2

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2015

Pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk miskin pada tahun 2010-2015 mengalami penurunan yang signifikan. Di Bangka Tengah pada tahun 2010 Laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi

dari pada Kepulauan Bangka Belitung yaitu 4,05 sedangkan di Kepulauan Bangka Belitung sendiri yaitu 3,41 dan mengalami penurunan yang signifikan sampai tahun 2015. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam perluasan pembangunan, dengan meningkatnya sumber daya manusia maka meningkat pula percepatan pertumbuhan suatu daerah.

Tabel: 1.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2015

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bangka	66,41	67,37	67,99	69,34	69,79	70,03
Belitung	66,79	67,17	67,87	69,27	69,56	70,29
Bangka barat	63,16	64,00	64,92	65,85	66,43	67,23
Bangka tengah	65,10	66,09	66,88	67,67	68,09	68,66
Bangka selatan	59,98	60,53	61,17	62,96	63,54	63,89
Belitung timur	64,99	65,86	66,59	67,71	68,10	68,83
Kota pangkajene	74,68	75,02	75,69	76,14	76,28	76,61

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Besarnya perubahan yang terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2010-2015 pada kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari Tabel 1.3 Pada tabel tersebut terlihat bahwa adanya perubahan IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan tersebut secara jelas dapat dilihat dari tahun ke tahun. IPM tahun 2010 paling tinggi di Kota pangkalpinang sebesar 74,68% dan paling rendah di Bangka Selatan sebesar 59,98% dan di tahun 2015 IPM di setiap Kabupaten/Kota

mengalami peningkatan. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam IPM harus mendapatkan perhatian. Manusia merupakan faktor penting sebagai indikator berhasil tidaknya pembangunan suatu daerah.

Dalam Indeks Pembangunan Manusia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia diantaranya:

Penelitian Mirza (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah.

Penelitian Bhakti (2012) dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2008-2012. Yang menyatakan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mirza (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh beberapa faktor seperti, kemiskinan, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan belanja modal dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “ *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010-2015 (studi kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*”.

B. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia sangat luas, maka penulis membatasi pembahasan masalah pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian pada penulisan ini yang akan dibahas adalah Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja modal. Data yang digunakan adalah data tahunan yaitu dari tahun 2010-2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan tentang hal yang telah diteliti, sehingga mampu membandingkan teori yang diterima di lapangan maupun di bangku perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.